VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA

Ahsani Sulhan[1)]*, Abdul Hamid[2)], Yulizar Pramudika Tawil[3)]

[1] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
saniahsanisulhan@gmail.com
[2] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
al_hamidku@yahoo.co.id
[3] Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
yulizarpramudika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 5 Dampelas Kabupaten Donggala. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, pihak sekolah, orang tua, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 5 Dampelas telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Dari aspek komunikasi, sekolah telah melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi mengenai persyaratan, wilayah zonasi, dan mekanisme PPDB, meskipun penyampaian perubahan aturan masih perlu ditingkatkan. Dari aspek sumber daya, panitia dan pembagian tugas telah tersedia, tetapi keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana masih menjadi kendala. Dari aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan kebijakan sesuai aturan dan memberikan pelayanan secara adil. Sementara itu, struktur birokrasi telah berjalan melalui pembentukan kepanitiaan dan pembagian tugas, meskipun sebagian masyarakat masih membutuhkan penjelasan mengenai prosedur zonasi. Secara keseluruhan, keterbatasan sumber daya serta masih adanya masyarakat yang memilih sekolah di luar wilayah zonasi menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 5 Dampelas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi, Peserta Didik Baru

VOL. 03, NO. 04, 2026
e-ISSN: 3047-4019 ONLINE
https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of the zoning system policy for New Student Admission (PPDB) at SMP Negeri 5 Dampelas, Donggala Regency. This study uses George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of four aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is descriptive qualitative. The informants in this study consisted of the principal, school staff, parents, and students. Data were collected through observation, interviews, and documentation, while data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of the zoning system policy for New Student Admission at SMP Negeri 5 Dampelas has been carried out but has not been fully optimal. In terms of communication, the school has conducted socialization and provided information regarding requirements, zoning areas, and the admission mechanism, although the dissemination of changes in regulations still needs to be improved. In terms of resources, the admission committee and division of duties have been established, but limited funding as well as facilities and infrastructure remain challenges. In terms of disposition, the implementers demonstrate a fairly good commitment to implementing the policy in accordance with the regulations and providing fair services. Meanwhile, the bureaucratic structure has been established through the formation of the admission committee and division of duties, although some members of the community still require further explanation regarding the zoning procedures. Overall, limited resources and the continued preference of some members of the community for schools outside their zoning areas are factors affecting the optimal implementation of the zoning system policy at SMP Negeri 5 Dampelas.

Keywords: Policy Implementation, Zoning System, Incoming Middle School Students

Submisi: 10-10-2026
Diterima: 11-10-2026
Dipublikasikan: 11-11-2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan nasional karena berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pendidikan, pemerintah menerapkan kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertujuan mendekatkan peserta didik dengan satuan pendidikan berdasarkan domisili serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan.

Kebijakan PPDB sistem zonasi telah diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021, serta regulasi daerah. Di Sulawesi Tengah, pelaksanaan PPDB juga mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2023. Kebijakan tersebut menekankan pelaksanaan PPDB secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kondisi daerah.

Namun, implementasi sistem zonasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Di SMP Negeri 5 Dampelas Kabupaten Donggala masih ditemukan peserta didik yang memilih melanjutkan pendidikan di luar wilayah zonasi. Berdasarkan data tahun 2021–2026, terdapat 54 peserta didik yang keluar dari wilayah zonasi atau rata-rata 9 peserta didik setiap tahun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan zonasi dengan pilihan masyarakat dalam menentukan sekolah. Pilihan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, seperti jarak, lingkungan sekolah, keinginan peserta didik, persepsi terhadap kualitas sekolah, serta kondisi sarana dan prasarana.

Selain permasalahan tersebut, pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 5 Dampelas menghadapi keterbatasan sumber daya, terutama komputer, jaringan internet, ruang pelayanan, dan anggaran. Sekolah telah melakukan sosialisasi dan membentuk panitia PPDB serta berupaya melaksanakan penerimaan sesuai petunjuk teknis Dinas Pendidikan. Akan tetapi, penyampaian informasi ketika terjadi perubahan aturan dan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan zonasi masih perlu ditingkatkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 5 Dampelas telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 5 Dampelas Kabupaten Donggala. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pelaksanaan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan sistem zonasi di tingkat sekolah.

METODE

Dasar penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada filosofi post-positivisme, digunakan untuk menyelidiki kondisi objek yang bersifat

alami, di mana penelitian berperan sebagai instrumen utama, analisis bersifat induktif atau kualitatif, hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi, serta pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi (kombinasi). Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengamati fenomena atau masalah yang dihadapi dalam konteks penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Donggala. Tipe penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terdapat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang masalah yang akan diteliti dan mampu menjelaskan data secara teratur, dengan harapan mampu memberikan penjelasan yang jelas mengenai masalah yang dikaji, yaitu Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB di SMP Negeri 5 Dampelas di Kabupaten Donggala.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Huberman dan Saldana (2014), yang terdiri atas beberapa yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara simultan dengan proses pengumpulan data, sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat diverifikasi sepanjang penelitian berlangsung. Pada tahap kondensasi data, informasi yang relevan dipilah dan difokuskan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi agar pola dan hubungan antar-temuan dapat terlihat dengan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui proses verifikasi berulang untuk memastikan keabsahan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 5 Dampelas Kabupaten Donggala. Menurut George C. Edward III, komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam penelitian ini, komunikasi dilihat melalui aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan sistem zonasi telah berjalan cukup baik. Pihak sekolah telah melakukan sosialisasi kepada orang tua, calon peserta didik, dan masyarakat mengenai wilayah zonasi, persyaratan, dokumen, serta mekanisme pendaftaran. Penyampaian informasi juga dilakukan secara langsung sehingga orang tua dan siswa memperoleh kesempatan untuk bertanya apabila terdapat hal yang belum dipahami.

Meskipun demikian, komunikasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sebagian masyarakat yang memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai

ketentuan sistem zonasi, terutama ketika terjadi perubahan atau penyesuaian aturan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transmisi dan kejelasan informasi telah berjalan cukup baik, tetapi konsistensi penyampaian informasi masih perlu diperkuat. Dengan demikian, komunikasi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 5 Dampelas dapat dikategorikan cukup baik, tetapi masih diperlukan peningkatan melalui penyampaian informasi yang lebih sederhana, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan karena kebijakan yang telah dikomunikasikan dengan baik tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Menurut Edward III, sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 5 Dampelas telah memiliki sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB melalui pembentukan panitia. Kepala sekolah, bidang kesiswaan, Tata Usaha, operator, guru, dan tenaga kependidikan memiliki tugas masing-masing dalam mendukung pelaksanaan PPDB sehingga proses penerimaan dapat berjalan secara terarah.

Namun, dari sisi anggaran dan sarana prasarana masih ditemukan berbagai keterbatasan. Ketersediaan komputer, jaringan internet, ruang pelayanan, serta beberapa fasilitas sekolah belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan PPDB. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi kelancaran administrasi dan pelayanan kepada calon peserta didik dan orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia telah tersedia dan mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi sumber daya finansial dan fasilitas pendukung masih menjadi kendala. Oleh karena itu, berdasarkan indikator Edward III, sumber daya merupakan salah satu aspek yang belum optimal dalam implementasi sistem zonasi di SMP Negeri 5 Dampelas.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi akan lebih mudah dicapai apabila pelaksana memiliki sikap positif dan komitmen terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak SMP Negeri 5 Dampelas memiliki komitmen dalam melaksanakan sistem zonasi sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Sekolah juga berupaya memberikan pelayanan secara adil kepada

seluruh calon peserta didik tanpa memberikan perlakuan khusus berdasarkan latar belakang maupun keinginan tertentu dari orang tua.

Meskipun sikap pelaksana telah mendukung kebijakan, masih terdapat sebagian orang tua dan siswa yang memilih sekolah di luar wilayah zonasi. Pilihan tersebut dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, seperti jarak, lingkungan sekolah, keinginan pribadi, serta kondisi sarana dan prasarana sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya berkaitan dengan sikap pelaksana, tetapi juga dengan penerimaan kelompok sasaran terhadap kebijakan. Dengan demikian, disposisi pelaksana dalam implementasi sistem zonasi di SMP Negeri 5 Dampelas dapat dikategorikan cukup baik karena terdapat komitmen untuk melaksanakan kebijakan secara adil, meskipun penerimaan sebagian masyarakat terhadap kebijakan masih perlu diperkuat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan indikator yang berkaitan dengan pembagian tugas, kewenangan, prosedur kerja, dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas diperlukan agar setiap pelaksana mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 5 Dampelas telah membentuk kepanitiaan PPDB dengan pembagian tugas yang jelas. Panitia terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, operator, guru, dan tenaga kependidikan yang memiliki tugas masing-masing. Pembentukan kepanitiaan tersebut dilakukan berdasarkan arahan kepala sekolah dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan PPDB.

Dalam pelaksanaannya, sekolah berpedoman pada peraturan dan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan. Namun, masih terdapat sebagian orang tua dan calon peserta didik yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan ketentuan sistem zonasi sehingga pihak sekolah perlu memberikan penjelasan dan pendampingan secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur kepanitiaan dan pembagian tugas telah berjalan dengan baik, tetapi pemahaman kelompok sasaran terhadap prosedur masih perlu diperkuat. Dengan demikian, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 5 Dampelas dapat dikategorikan cukup baik, terutama dari sisi pembagian tugas dan koordinasi, namun masih diperlukan penyederhanaan informasi prosedur agar lebih mudah dipahami masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan keempat indikator implementasi kebijakan George C. Edward III, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 5 Dampelas Kabupaten Donggala telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Komunikasi telah dilakukan melalui sosialisasi dan penjelasan langsung kepada

masyarakat, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dalam menjalankan kebijakan secara adil, serta struktur birokrasi telah didukung oleh pembentukan panitia dan pembagian tugas yang jelas. Sementara itu, sumber daya masih menjadi kendala, khususnya keterbatasan anggaran, komputer, jaringan internet, dan ruang pelayanan. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang memilih sekolah di luar wilayah zonasi karena mempertimbangkan jarak, lingkungan, keinginan pribadi, dan kondisi fasilitas sekolah. Dengan demikian, ketercapaian tujuan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 5 Dampelas masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, konsistensi komunikasi, serta pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2016). Kebijakan publik. Bandung: CV Pustaka Setia.

Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.

Anderson, J. E. (2003). Public policymaking (5th ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). The SAGE handbook of qualitative research (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Dunn, W. N. (2003). Public policy analysis: An introduction (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Dwijiwijoto, R. I., & Nugroho, R. (2006). Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Dye, T. R. (1995). Understanding public policy (8th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Edwards, G. C., III. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Friedrich, C. J. (1963). Man and his government. New York, NY: McGraw-Hill.

Grindle, M. S. (Ed.). (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Jenkins, W. I. (1978). Policy analysis: A political and organizational perspective. London: Martin Robertson.

Jones, C. O. (1991). An introduction to the study of public policy (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.

Kartiwa, A., & Nugraha, S. (2012). Implementasi kebijakan publik. Bandung: Pustaka Setia.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Glenview, IL: Scott, Foresman.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Nugroho, R. (2008). Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Nugroho, R. (2011). Kebijakan publik di negara-negara berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pramono, E. (2020). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif administrasi negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Suaib, M. (2016). Model implementasi kebijakan publik. Makassar: Pustaka Refleksi.

Subarsono, A. G. (2005). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Widodo, J. (2010). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, B. (2007). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS.

TENTANG PENULIS